

**TEOLOGI PUBLIK DAN BUDAYA HUMAT TIMOR: RELEVANSINYA BAGI
MULTIKULTURALISME DI INDONESIA**

Rikhardus Poli ^{*1)}
Raymundus I Made Sudhiarsa ²⁾

^{1,2} Filsafat Teologi STFT Widya Sasana Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email*: rkhardusplimsf63@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Kata Kunci: Teologi Publik; Budaya Humat; Multikulturalisme; Timor-Dawan; Indonesia.	Tulisan ini berfokus pada relevansi budaya <i>humat</i> (persaudaraan) dalam tradisi Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai basis bagi pengembangan teologi publik yang kontekstual dalam masyarakat multikultural Indonesia. Dalam tradisi Timor, <i>humat</i> dimaknai sebagai persaudaraan dan solidaritas yang melampaui ikatan biologis, terwujud dalam praktik gotong royong, rekonsiliasi adat, dan keterbukaan terhadap 'yang lain'. Dengan metode kualitatif khususnya pendekatan deskriptif-analitis, tulisan ini menunjukkan bahwa <i>humat</i> memiliki tiga dimensi penting yang selaras dengan prinsip teologi publik yakni solidaritas, persaudaraan lintas identitas, dan rekonsiliasi. Ketiganya memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat multikulturalisme Indonesia di tengah ancaman intoleransi dan fragmentasi sosial. Dengan demikian, temuan dari tulisan ini menegaskan bahwa <i>humat</i> bukan sekadar warisan budaya lokal Timor, melainkan sumber inspirasi etis-teologis bagi pengembangan teologi publik yang relevan dalam konteks Indonesia multikultural.
Keywords: Public Theology; Humat Culture; Multiculturalism; Timor-Dawan; Indonesia.	Abstract <i>This paper focuses on the relevance of the humat culture (brotherhood) in the Timorese tradition of East Nusa Tenggara (NTT) as a foundation for developing a contextual public theology within Indonesia's multicultural society. In the Timorese tradition, humat is understood as brotherhood and solidarity that transcend biological ties, manifested through practices of mutual cooperation, customary reconciliation, and openness toward "the other." Using a qualitative method, particularly a descriptive-analytical approach, this study reveals that humat embodies three essential dimensions aligned with the principles of public theology: solidarity, inter-identity brotherhood, and reconciliation. These dimensions contribute significantly to strengthening Indonesian multiculturalism amid the threats of intolerance and social fragmentation. Thus, the findings affirm that humat is not merely a local cultural heritage of Timor, but an ethical-theological source of inspiration for developing a relevant public theology in Indonesia's multicultural context.</i>

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, yakni intoleransi agama, politik identitas yang memecah belah, serta individualisme yang kian mengikis solidaritas sosial (Haryatmoko, 2015). Di tengah dinamika sosial-politik Indonesia yang majemuk, diskursus multikulturalisme sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan interaksi antar-agama dan antar-budaya. Dalam konteks ini, Teologi Publik muncul sebagai sebuah pendekatan yang mencoba menjembatani ranah privat keyakinan dengan ruang publik yang plural. Teologi Publik tidak hanya berfokus pada doktrin keagamaan internal, melainkan pada kontribusi nilai-nilai keagamaan untuk kebaikan bersama dan keadilan sosial. Bagi Armada Riyanto, Teologi publik dapat diterjemahkan sebagai teologi keterlibatan. Dengan mengutip pandangan David Tracy, ia menegaskan bahwa dalam konteks keterlibatan, melakukan tidak pembedaan dunia yang dimasuki oleh para teolog, yaitu Gereja, akademik dan masyarakat (Riyanto, 2021c). Dengan demikian, puncak dari semua itu teologi harus memiliki skema partisipasi secara aktif dalam masyarakat umum.

Sementara itu, di wilayah paling timur Indonesia, Timor, sebuah kekayaan budaya yang disebut "*Humat*". *Humat* merupakan suatu tradisi di Suku Dawan NTT yang menawarkan kearifan lokal yang mendalam tentang relasionalitas, kebersamaan, dan harmoni (Do Santos et al., 2024). Esai ini berargumen bahwa Teologi Publik, yang dipadukan dengan nilai-nilai budaya *Humat* Timor, memiliki relevansi signifikan dalam memperkuat fondasi multikulturalisme di Indonesia. Dengan menganalisis bagaimana Teologi Publik dapat mengartikulasikan nilai-nilai *Humat* Timor ke dalam wacana nasional, karya tulis ini bertujuan menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat menjadi sumber daya teologis-etis yang vital bagi pluralisme dan keharmonisan sosial.

Teologi Publik adalah sebuah pendekatan teologis yang mengkaji peran agama dalam ruang publik, berfokus pada kontribusi agama terhadap kebaikan bersama (*common good*) tanpa memaksakan doktrin partikularistik. Pendekatan ini menantang pandangan bahwa agama harus dipisahkan sepenuhnya dari ruang publik, sebaliknya, ia mendorong partisipasi kritis umat beragama dalam wacana sosial dan politik. Bagi Armada Riyanto, publik atau privat pertamanya mengatakan suatu relasionalitas (Riyanto, 2021b). Di sisi lain, Budaya Humat Timor, sebuah kearifan lokal yang hidup di Pulau Timor, menawarkan nilai-nilai otentik seperti persaudaraan, solidaritas, dan penghormatan terhadap alam, yang secara inheren selaras dengan prinsip-prinsip inklusif.

Diskursus mengenai multikulturalisme di Indonesia telah menjadi subjek penelitian yang ekstensif, namun seringkali cenderung mengkaji dari perspektif sosiologi politik dan antropologi (Yulianto, 2024; Ismaya et al., 2024). Studi-studi ini sering menyoroti tantangan-tantangan multikulturalisme, seperti konflik horizontal dan radikalisme (Irfan & Wijaya, 2024; Ningsih et al., 2025). Namun, literatur yang secara eksplisit menggali peran teologi publik dan kearifan lokal sebagai solusi masih relatif terbatas.

Dalam Teologi Publik, karya-karya seperti karya Smith dari Barat menjadi rujukan utama. Ia menekankan peran agama sebagai agen keadilan dan perubahan sosial (Smith, 2022). Di Indonesia, beberapa teolog telah mulai mengadaptasi Teologi Publik, tetapi belum secara mendalam berinteraksi dengan tradisi lokal seperti *Humat*. Mengenai budaya *Humat* Timor, literatur yang ada sebagian besar bersifat etnografis atau antropologis, mendeskripsikan praktik-praktik dan nilai-nilai (Ethelbert et al., 2022; Do Santos et al., 2024). Mereka mengidentifikasi *Humat* sebagai sistem etika yang berpusat pada relasi dan kebersamaan, tetapi belum mengartikulasikannya dalam kerangka teologis-politik yang lebih besar.

Belum ada studi yang secara sistematis menyatukan Teologi Publik dan budaya *Humat* Timor untuk membangun sebuah argumen yang koheren tentang multikulturalisme di Indonesia. Esai ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menawarkan sintesis teologis-etis-budaya yang unik. Pernyataan masalah utama yang diajukan adalah bagaimana Teologi Publik dapat menjadi kerangka teoretis untuk mengangkat nilai-nilai universal dari Budaya *Humat* Timor, sehingga relevan dan dapat berkontribusi secara signifikan pada penguatan multikulturalisme di Indonesia?

Tujuan karya ilmiah ini yakni pertama untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai universal dalam Budaya *Humat* Timor. Kedua, untuk meninjau konsep Teologi Publik sebagai kerangka kerja yang relevan untuk dialog antarbudaya; dan ketiga, untuk menunjukkan bagaimana kearifan lokal *Humat* Timor dapat diintegrasikan dalam wacana multikulturalisme di Indonesia. Signifikansi penulisan ini terletak pada upaya mengisi kekosongan literatur yang membahas peran teologi dan budaya lokal secara sinergis. Diharapkan, artikel ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data utama yang digunakan adalah teks-teks akademik, jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan Teologi Publik, budaya *Humat* Timor, dan multikulturalisme di Indonesia. Pendekatan kualitatif cocok untuk menggali makna, praktik, dan konteks sosial-kultural yang kompleks dalam komunitas Timor serta implikasinya bagi teori dan praktik multikulturalisme di Indonesia (Riyanto, 2020).

Pendekatan deskriptif-analitis merupakan salah satu bentuk metode kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan obyek kajian secara sistematis sekaligus memberikan analitis kritis. Penulis menempuh dua tahap dalam menyelesaikan tulisan ini. Tahap pertama, penulis melakukan kajian terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan teologi publik dan budaya *humat* untuk menjelaskan kedua konsep ini secara lebih mendalam. Tahap kedua, penulis melakukan analisis terhadap kedua konsep ini untuk mencari titik temu maupun perbedaan, dan menghubungkannya dengan dinamika multikulturalisme di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Teologi Publik dan Perannya dalam Ruang Publik

Teologi Publik (*public theology*) pertama kali diperkenalkan oleh para teolog Protestan di Amerika Utara pada abad ke-20, sebagai respons terhadap meningkatnya sekularisme dan pluralisme agama. David Tracy, salah satu tokoh utamanya, mendefinisikan Teologi Publik sebagai "dialog yang terus-menerus antara teologi dan budaya publik, yang mencari titik temu antara iman dan pengalaman manusia" (Tracy, 1981). Pendekatan ini membedakan dirinya dari Teologi Privat, yang hanya berfokus pada keselamatan individu dan pengalaman spiritual pribadi. Teologi Publik, sebaliknya, menekankan tanggung jawab teologis terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik, seperti keadilan, kemiskinan, dan HAM. Dengan demikian, bahasan teologi publik bukan hanya "*intra ecclesiam*" (di dalam Gereja), tetapi juga menyangkut "*extra ecclesiam*" (di luar Gereja).

Perlu dibedakan antara teologi publik, teologi politik, dan teologi kontekstual. Teologi politik cenderung menekankan relasi langsung antara iman dan struktur kekuasaan politik, seringkali dalam kerangka perjuangan melawan tirani atau ketidakadilan struktural misalnya dalam teologi

pembebasan Amerika Latin (Hesselmans & Teubner, 2017). Teologi kontekstual menekankan pentingnya membaca teks iman dalam konteks sosial-budaya tertentu. Sementara itu, teologi publik berupaya menjembatani keduanya yakni ia berakar pada iman, terbuka pada konteks, namun secara sadar menempatkan dirinya dalam ruang dialog publik. Dengan demikian, teologi publik bukanlah propaganda agama di ruang politik, melainkan tawaran refleksi yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan etis di hadapan publik yang majemuk (Smit, 2007).

Teologi Publik didefinisikan sebagai upaya teologis untuk merefleksikan dan berinteraksi dengan isu-isu publik, seperti keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan. Berbeda dari teologi tradisional yang cenderung esoteris, Teologi Publik berorientasi pada praksis dan dialog. Menurut Smith (2022), "Teologi Publik tidak hanya berbicara kepada umat beriman, tetapi juga berbicara untuk kebaikan bersama, menerjemahkan nilai-nilai iman ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh publik yang beragam." Konsep ini memungkinkan agama untuk berperan konstruktif, tidak hanya sebagai sumber konflik, tetapi sebagai mitra dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Di Indonesia, di mana agama memiliki peran sentral, Teologi Publik dapat menjadi alat kritis untuk mengkritik fundamentalisme dan eksklusivisme, serta mempromosikan inklusivisme.

Kritikus Teologi Publik berargumen bahwa pendekatan ini dapat berisiko mencampuradukkan politik dengan agama. Namun, pendukungnya, seperti Juergen Habermas, melihatnya sebagai cara bagi agama untuk berpartisipasi dalam "ruang publik sekuler" dengan cara yang rasional dan dapat dipahami oleh semua pihak. Richard John Neuhaus, dalam karyanya *The Naked Public Square*, menegaskan bahwa mengusir agama dari ruang publik hanya akan menciptakan kekosongan moral yang

dapat diisi oleh ideologi lain (Hargrove & Neuhaus, 1985). Oleh karena itu, Teologi Publik menawarkan jalan tengah yang konstruktif, di mana agama tidak mendominasi, tetapi berkontribusi pada kebaikan bersama melalui argumen moral yang relevan.

Armada Riyanto berpendapat bahwa Felix Wilfred mencita-citakan sebuah teologi yang terus memperbaharui diri, bukan hanya dalam bahasa dan metodologi, melainkan juga dalam "keterlibatannya" dan dialognya dengan model-model berpikir baru yang ditawarkan oleh Sejarah, kebudayaan, tradisi, filsafat yang menjadi milik manusia zaman ini. Artinya berteologi tidak hanya merefleksikan iman dan mewartakannya kepada orang lain, tetapi membangun dialog tentang berbagai konteks tradisi, sejarah, kebudayaan, bahasa, dan filsafat (Riyanto, 2021). Dialog inilah yang mampu membawa teologi ke ranah publik dan mendapat relevansinya. Artinya Teologi publik tidak bekerja dalam isolasi, melainkan dalam dialog dengan tradisi agama lain, ilmu pengetahuan, serta budaya lokal (Paeth, 2017). Dengan demikian, ia menghargai keragaman sebagai kekayaan, bukan ancaman.

Gregorius Pasi juga dalam pandangannya dengan mengutip pendapat Felix Wilfred mengatakan bahwa teologi publik tidak memiliki karakter "mentalitas batas". Di mana teologi publik tidak mengisolasi diri pada proporsi-proporsi iman yang kurang atau tidak bersentuhan dengan realitas kehidupan publik. Titik tolaknya adalah realitas sehari-hari dalam memandang Kitab Suci dan Tradisi demi membangun hidup bersama yang baik (*bonum communa*). Pasi juga menegaskan bahwa perlunya keterbukaan untuk berinteraksi dengan pihak lain (Pasi, 2021).

Teologi publik adalah disiplin reflektif yang berusaha menerjemahkan sumber-sumber teologis menjadi pembicaraan normatif dalam ruang publik yang plural. Ketika teologi publik berhadapan dengan

budaya, ia tidak hanya berbicara tentang “nilai-nilai” abstrak tetapi juga harus menanggapi praktik, simbol, dan narasi budaya yang membentuk identitas bersama masyarakat. Interaksi ini memunculkan pertanyaan metodologis dan etis: bagaimana teologi mempertahankan integritas doktrinalnya sambil menghormati pluralitas budaya; kapan inkulturasi menjadi dialog kreatif, dan kapan ia berisiko menjadi *appropriasi* atau dominasi budaya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini penting bagi efektivitas teologi publik dalam konteks global dan lokal (Schliesser, 2023).

Meskipun demikian, pandangan Antonius Tukan dan Fransiskus Janu tentang teologi yang sadar konteks perlu diindahkan apa yang dinamakan transformasi budaya oleh Injil. Tugas sejati teologi adalah menerjemahkan inti iman dengan bahasa atau cara piker konteks atau budaya setempat. Maka seorang teolog diharapkan mampu melihat cela budaya yang tidak sesuai dengan semangat dasar injil. Seorang teolog perlu keberanian untuk mengkritisi budaya yang dimasukinya (Tukan & Janu, 2021). Dengan demikian, Teologi dalam kaitannya dengan budaya tidak ditafsirkan begitu saja namun perlu disesuaikan dengan inti iman kristiani yang puncaknya pada “peristiwa Yesus”.

Menurut Raymundus Sudhiarsa, kalau teologi publik dipahami sebagai teologi yang salah satu perannya menanggapi isu-isu masyarakat, sedemikian diharapkan juga turut berperan langsung dalam perubahannya (Sudhiarsa, 2021). Artinya teologi publik menjadi partisipan yang aktif bukan pasif. Dalam hal ini, Raymundus menegaskan bahwa validitas iman kristiani tidak diletakkan pada logika bahasa atau rumusan-rumusan spekulatif, melainkan lebih-lebih pada tugasnya dalam ranah praksis, implementasi, dan dampaknya dalam masyarakat.

Budaya *Humat* dan Kearifan Lokal di Timor Dawan

Suku Dawan (juga dikenal *Atoni* atau *Atoin Meto*) adalah salah satu kelompok etnis utama di pulau Timor. Kebudayaannya kaya meliputi rumah tradisional bundar (*Ume Kbbubu/uma lulik*), sistem ritus agraris dan pemanenan, tradisi rekonsiliasi naketi, tangisan adat *kulut kaet*, serta sistem tutur tradisional seperti *naton* yang menyimpan pengetahuan ekologis, kosmologi, dan nilai sosial. Dalam praktik sehari-hari dan upacara, nilai kolektif keterkaitan manusia-alam-leluhur terus terlihat meski mengalami transformasi oleh agama, pendidikan, dan modernisasi (Boldoni, 2020).

Suku Dawan (*Atoni Meto*) tersebar di wilayah barat dan tengah Pulau Timor (NTT/Timor-Leste/Oecusse). Mereka dikenal memiliki sistem simbolik spasial yang kuat (misalnya. pembagian kanan-kiri, pusat-periferi) yang membentuk tata rumah, peranan gender ritual, dan hirarki sosial. Struktur rumah tangga dan rumah ritual yang kadang disebut *ume 6 uma* bukan sekadar arsitektur tetapi juga medium penyimpanan norma, hukum adat, dan relasi kekerabatan. Peran tokoh adat (*lia-nain* atau pemimpin adat) berperan dalam memediasi konflik, memimpin upacara, dan menjaga *lulik*/ruang sakral (Sili, 2025).

Dalam bahasa sehari-hari masyarakat Timor Dawan (*Atoni Meto* atau *Uab Meto*), konsep keramahan, penerimaan tamu, dan tata cara melayani tamu di rumah adat merupakan inti dari praktik sosial yang sering dirujuk secara kolektif sebagai perilaku tamu-tuan. Di sini digunakan istilah *Humat* untuk merangkum fungsi sosial tersebut (penyuguhan sirih-pinang, penyajian *Okomama*, ucapan adat/puisi *Naton*, dan ritual *pemali*). Praktik ini bukan sekadar sopan santun tetapi suatu praktik yang memuat nilai kosmologis, ekonomis, dan struktur kekerabatan yang mengikat komunitas (Meluk et al., 2022).

Humat di sini dipakai sebagai istilah ringkas untuk merujuk pada praktik keramahan, penyambutan tamu, dan ritus sosial terkait yang dijumpai dalam komunitas

Timor Dawan (*Atoni / Atoni Meto*). Praktik ini meliputi penyuguhan sirih-pinang melalui wadah tradisional (*okomama*), ritual makan sirih (*mamat*), tuturan adat (*naton*), serta aturan pemali dan tata tempat pada rumah adat. Pada level mikro, *humat* menegaskan perilaku interpersonal (tuan-tamu) sedangkan pada level makro, ia mereproduksi norma kekerabatan, legitimasi sosial, dan keseimbangan kosmologis (Suminar, 2020).

Dalam masyarakat Dawan, *humat* dimaknai sebagai ruang perjumpaan. Secara harfiah, ia menunjuk pada tindakan “berkumpul” atau “bertemu” yang melampaui sekadar interaksi fisik. *Humat* merupakan wadah di mana masyarakat membangun relasi timbal balik antara individu dengan komunitas, manusia dengan leluhur, serta manusia dengan alam. Nilai utama yang terkandung adalah resiprositas (saling memberi dan menerima) serta solidaritas kolektif. Beberapa peneliti menyebut *humat* sebagai wujud dari “etika relasional” khas masyarakat Timor, di mana identitas individu tidak pernah dilepaskan dari jaringan sosialnya (Haba, 2007). Tradisi ini menjembatani kebutuhan praktis seperti gotong royong dengan dimensi simbolis seperti penghormatan leluhur dan ritus adat.

Komunitas Dawan berbicara bahasa rumpun Austronesia (Dawan atau *Uab Meto*) dan memiliki kosakata ritual yang sangat terasosiasi dengan praktik keramahan (misalnya, *manus/puah* untuk sirih-pinang; *okomama* sebagai wadah). Warisan leksikal dan bentuk tuturan (*naton*) berfungsi sebagai arsip lisan yang menyimpan norma, mitos asal, dan aturan sosial. Secara teoritis, analisis *humat* meminjam dari fungsionalisme (ritual sebagai mekanisme stabilisasi sosial) dan teori simbolik menegaskan ritual sebagai sistem tanda yang menegaskan identitas dan relasi kuasa (Bantaika et al., 2025).

Pertama, *Naketi* merupakan suatu tindakan rekonsiliasi atau pemaafan

kolektif. *Naketi* adalah upacara untuk menyelesaikan sengketa, memulihkan harmoni sosial, dan “membersihkan” pelanggaran agar siklus sosial tetap berlanjut. Ia mengandung unsur pengakuan, kompensasi, doa, dan pemulihan hubungan antara pihak yang berkonflik. Studi empiris modern menempatkan *naketi* sebagai mekanisme manajemen konflik lokal yang masih relevan dan berfungsi sebagai pastoral sosial (A. M. P. Benu et al., 2023).

Kedua, *Okomama* adalah wadah, komposisi, dan performativitas. *Okomama* bukan sekadar benda tetapi merupakan *device* ritus untuk menyajikan sirih-pinang sebagai tanda penghormatan. Komposisi (daun sirih, pinang, kapur), urutan penyajian, dan kata pembuka yang menyertai penyuguhan membentuk protokol penerimaan tamu yang baku dalam banyak komunitas Dawan. Hal ini menunjukkan bahwa variasi bentuk *okomama* dan tata urutan penyajian dapat mengindikasikan status tamu, hubungan kekerabatan, dan maksud upacara misalnya kunjungan hormat, negosiasi, rekonsiliasi (Suminar, 2020).

Ketiga, *Mamat* dan pranata makan sirih. Ritual makan sirih (*mamat*) adalah praktik rutin dan ritual yang memfasilitasi komunikasi sosial yaitu percakapan adat, penguatan solidaritas, atau mekanisme rekonsiliasi. Konsumsi sirih berfungsi sebagai ritual yang menandai masuknya seseorang ke dalam arena sosial tertentu misalnya masuk rumah adat atau hendak memulai perundingan. Analisis etnografis menunjukkan bahwa *mamat* juga mengandung aspek etika. Artinya ketika menolak penyuguhan dapat dilihat sebagai penghinaan dan pelanggaran norma *humat* (Un Bria et al., 2025).

Keempat, *Naton* berarti tuturan adat sebagai arsip lisan. *Naton*, berupa puisi atau tuturan adat yang diucapkan pada kesempatan penyambutan, perkawinan, atau penyelesaian sengketa, menyimpan memori kolektif sejarah marga, petuah moral, dan aturan kewajiban. Beberapa penelitian

menegaskan peran *naton* bukan hanya estetis tetapi fungsional di mana dapat menyampaikan norma dan mengendalikan konflik melalui bahasa yang dipahami bersama. Selain itu, kajian ecolinguistik baru menemukan metafora ekologis dalam *naton* yang mengaitkan nilai-nilai sosial dengan lahan dan lingkungan sekitar (N. N. Benu et al., 2025).

Akhirnya, *Humat* memiliki beberapa fungsi penting bagi orang Timor Dawan. Pertama, *Humat* menjadi ruang pertemuan masyarakat untuk membahas urusan penting, seperti pernikahan, penyelesaian konflik, atau upacara adat. Dalam ruang ini, setiap orang memiliki hak bicara, tetapi selalu dalam kerangka hormat pada tetua adat. Kedua, *Humat* terkait erat dengan praktik gotong royong, misalnya saat membuka ladang, membangun rumah, atau panen bersama. Nilai resiprositas menjadi modal sosial yang menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Ketiga, dalam *Humat*, hubungan dengan leluhur dan Yang Ilahi ditegaskan melalui ritual adat. Ini mencerminkan keyakinan bahwa kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan spiritual. Keempat, melalui *Humat*, generasi muda diperkenalkan dengan nilai-nilai etika, tata krama, dan kearifan lokal. Proses ini menjadikan *Humat* sebagai “sekolah kehidupan” tradisional (Ndun, 2015).

Sinergi Teologi Publik dan Budaya *Humat* untuk Multikulturalisme

Multikulturalisme di Indonesia adalah sebuah realitas yang kompleks. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan enam agama yang diakui secara resmi, Indonesia adalah sebuah “mozaik” yang indah, namun rentan (Ayunda et al., 2022). Sejak reformasi 1998, Indonesia mengalami pasang surut dalam isu toleransi. Di satu sisi, demokratisasi telah membuka ruang bagi kebebasan beragama dan berekspresi. Di sisi lain, hal ini juga memicu munculnya kelompok-kelompok identitas yang eksklusif dan intoleran. Isu-isu seperti

pendirian rumah ibadah, perkawinan beda agama, dan ekspresi keyakinan minoritas seringkali menjadi sumber ketegangan.

Multikulturalitas bangsa juga sering dipandang sebagai suatu realitas dalam komunitas Indonesia yang tak mungkin dipungkiri dan dihindari. Bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa dan agama sering dilihat sebagai berkah dan hikmah apabila setiap orang mampu mengaransemennya dalam sebuah keterpaduan yang menghasilkan keindahan dan kekuatan. Tetapi juga bisa menjadi musibah disintegrasikan bangsa, manakala multikulturalitas itu tidak terakomodasi dengan baik (Baylon, 2021). Oleh karena itu, perlunya suatu kajian yang lebih mendalam agar tidak terjadi berbagai perpecahan dalam bangsa.

Teologi publik sebagai sebuah disiplin reflektif yang membawa wawasan iman ke pembicaraan publik (politik, etika sosial, ekonomi, lingkungan) dengan tujuan membentuk kehidupan bersama yang adil dan manusiawi bukan untuk mendikte negara, tetapi untuk memberi kritik normatif dan sumber daya moral bagi ruang publik. Dalam konteks kepulauan/komunitas lokal, pendekatan teologi publik harus kontekstual dan responsif terhadap pengalaman ketidakadilan dan kearifan lokal (Yosia, 2023). Budaya *humat* atau kearifan Timor (Dawan), dari kajian etnografi dan penelitian kearifan lokal di Timor, misalnya. praktik ritual, *naton*, siri pinang, tampak nilai-nilai bersama yakni penghormatan, tanggung jawab kolektif, relasi manusia-alam, dan peran lembaga adat sebagai mediator sosial (Falo & Kolne, 2024). Nilai-nilai ini menjadi modal sosial yang kuat untuk praktik pluralitas di tingkat lokal.

Relevansi utama dari Teologi Publik dan Budaya *Humat* Timor terletak pada potensinya untuk saling melengkapi dalam memperkuat multikulturalisme di Indonesia. Teologi Publik menyediakan kerangka intelektual untuk mengevaluasi dan mempromosikan nilai-nilai universal yang

terkandung dalam Budaya *Humat*. Sementara itu, Budaya *Humat* menawarkan model konkret dan otentik tentang bagaimana nilai-nilai luhur dapat diinternalisasi dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, konsep *Naketi* dapat menjadi dasar teologis untuk mempromosikan keadilan sosial, di mana masyarakat secara kolektif bertanggung jawab atas kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Memadukan Teologi Publik dan budaya *Humat* menciptakan sinergi yang kuat. Teologi Publik dapat menyediakan kerangka teoretis untuk mengartikulasikan nilai-nilai *Humat* ke dalam bahasa yang lebih universal dan dapat dimengerti oleh publik yang lebih luas. Misalnya, nilai gotong royong dalam *Humat* dapat diterjemahkan sebagai etika solidaritas publik, yang melampaui batas-batas suku atau agama. Praktik "*na'i na'i, feto feto*" dapat menjadi landasan teologis-etis untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam wacana publik. Sebaliknya, budaya *Humat* memberikan substansi lokal yang kaya dan otentik bagi Teologi Publik di Indonesia. Teologi Publik yang berakar pada kearifan lokal seperti *Humat* akan lebih relevan dan berdaya guna dalam konteks Indonesia, dibandingkan dengan teologi yang sepenuhnya mengimpor teori-teori Barat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa multikulturalisme tidak hanya tentang toleransi pasif, tetapi juga tentang pengakuan aktif terhadap kontribusi unik dari setiap tradisi lokal.

Penerapan sinergi ini dapat dilihat dalam berbagai inisiatif komunitas di Timor. Contohnya, program-program pembangunan yang berbasis pada semangat "*uman*" (gotong royong) telah berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya. Teolog dan aktivis lokal dapat menggunakan narasi *Humat* untuk memobilisasi partisipasi komunitas dalam isu-isu publik, seperti konservasi lingkungan atau pendidikan

perdamaian. Ini adalah model yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia, di mana Teologi Publik dapat menggali kekayaan tradisi lokal untuk membangun jembatan antar-budaya dan antar-agama. Dengan demikian, multikulturalisme bukan lagi sekadar slogan, tetapi sebuah realitas yang dijalankan melalui praksis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Teologi publik menyediakan istilah-nilai (keadilan, martabat manusia, kebaikan bersama) yang dapat 'dipadu' dengan nilai lokal (hormat, tanggung jawab komunal). Kombinasi ini menghasilkan narasi publik yang memerdekakan sekaligus menghargai kearifan lokal (Pakpahan, 2020). Lembaga adat, organisasi keagamaan dan *civil society* dapat membentuk forum deliberatif (mediasi konflik, dialog antaragama, pendidikan publik). Teologi publik membantu gereja/organisasi agama merumuskan respons etis terhadap isu sosial, sedangkan lembaga adat menerjemahkan norma itu ke praktik kultural yang diterima komunitas. Studi tentang peran lembaga adat di Timor menunjukkan kapasitas kearifan lokal untuk mengatur perilaku kolektif misalnya, ritual, tata relasi tani (Falo & Kolne, 2024). Kurikulum nilai multikultural di sekolah dan pesantren/gereja, yang memasukkan refleksi teologis tentang pluralitas serta pelajaran nilai dari kearifan lokal (*naton*, siri, ritual pertanian dan lain-lain) untuk membentuk empati dan tanggung jawab bersama. Program publik, misalnya dialog antar-komunitas, tata kelola sumber daya alam berbasis adat menjadi kesempatan pengaplikasian teologi publik yang berbasis lokal. (Nugraha et al., 2020). Dengan demikian, teologi publik dan budaya *humat* Timor dapat diaplikasikan dalam membangun multikulturalisme di Indonesia melalui pengalaman sehari-hari.

Perlunya kajian yang reflektif dan mendalam sehingga teologi publik dan budaya *humat* tidak sekedar konsep yang bias begitu saja. Pertama, budaya *Humat* Timor bisa kehilangan relevansi bila hanya

diperlakukan secara romantis. Tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi lokal kadang juga memuat unsur hierarkis, patriarkal, atau eksklusif yang perlu ditafsir ulang agar tetap mendukung nilai keadilan dan kesetaraan gender (Ross, 2012). Teologi publik tidak cukup mengafirmasi tradisi, melainkan harus mengolahnya secara reflektif dan kritis agar selaras dengan tantangan zaman.

Kedua, teologi publik berbasis budaya *Humat* Timor harus siap berdialog dengan arus globalisasi di mana sekularisasi yang cenderung memprivatisasi agama, kapitalisme yang mengikis nilai kebersamaan, dan politik global yang sering memeralat identitas agama (Ricoeur & Blamey, 2024). Dalam situasi seperti ini, nilai komunalitas *Humat* Timor dapat tampil sebagai kritik profetis terhadap model pembangunan modern yang mengabaikan dimensi keadilan sosial.

Ketiga, dalam konteks politik Indonesia, *Humat* Timor dapat dipahami sebagai model ruang publik. *Humat* bukan sekadar rumah fisik, tetapi sebuah metafora sosial di mana semua anggota komunitas memiliki ruang, suara, dan martabat (Handoyo, 2016). Prinsip ini sangat relevan dengan demokrasi Indonesia yang masih rapuh oleh praktik mayoritarianisme dan eksklusivisme kelompok. *Humat* mengajarkan bahwa ruang publik harus dirancang sebagai rumah bersama (*common home*), di mana perbedaan tidak dihapuskan, tetapi diintegrasikan dalam relasi yang setara.

Lebih jauh, *Humat* Timor dapat dibaca dalam terang persekutuan Trinitaris, di mana relasi antarpribadi ilahi tidak saling meniadakan, melainkan saling menopang (Guthrie, 1989). Dengan demikian, *Humat* bukan hanya inspirasi sosial, tetapi juga simbol teologis tentang bagaimana hidup bersama dalam keragaman harus dijalankan di mana bukan dominasi, melainkan persekutuan. Teologi publik yang berakar pada *Humat* menjembatani iman, budaya, dan ruang sosial membawa agama keluar

dari isolasi privat menuju praksis solidaritas publik.

Walaupun potensial besar, sinergi ini menghadapi beberapa hambatan seperti instrumentalisasi agama atau adat oleh kepentingan politik yang dapat mempolarisasi wacana publik, ketimpangan kekuasaan antara kelompok mayoritas dan minoritas yang menjadikan proses deliberatif tidak setara, resiko translasi konsep, yakni jika istilah lokal seperti *humat* diterjemahkan secara buruk tanpa landasan etnografi, kebijakan yang dihasilkan bisa tidak relevan atau merusak praktik lokal (Taneo, 2025). Maka perlunya usaha yang kajian yang mendalam dan reflektif sehingga tidak salah jalan atau salah kaprah dalam menerjemahkan teologi publik dalam ranah lokal.

SIMPULAN DAN SARAN

Teologi publik yang berpijak pada budaya *Humat* Timor mengajarkan bahwa iman tidak boleh berhenti pada ruang liturgis internal Gereja, melainkan harus menyeberang ke ruang sosial, politik, dan kebudayaan. Dalam hal ini, *Humat* Timor sebagai simbol rumah, tempat berkumpul, dan ruang komunal menjadi model hidup bersama yang menekankan relasi, solidaritas, dan penghormatan pada keberagaman. Nilai-nilai ini bukan saja relevan untuk masyarakat Timor, tetapi juga menjadi tawaran teologis yang signifikan bagi kehidupan berbangsa dalam keragaman Indonesia.

Multikulturalisme yang sering dipahami hanya sebatas slogan *Bhinneka Tunggal Ika* membutuhkan fondasi praksis yang lebih konkret. Dalam konteks inilah, budaya *Humat* Timor menawarkan paradigma alternatif sehingga keragaman tidak dianggap ancaman, tetapi sebagai kekayaan yang hanya dapat bertahan bila dirawat melalui relasi timbal balik. Teologi publik berbasis *Humat* menghidupkan kembali etika musyawarah, keterbukaan pada “yang lain,” dan kesadaran bahwa manusia tidak pernah hidup sendiri.

REFERENSI

- Ayunda, A. Z., Urbaningkrum, S. M., Nusaibah, A. W., Septiana, W., Widyani, S. S. N., & H, A. R. (2022). Tantangan Multikulturalisme di Indonesia: Menyoal Relasi Agama dan Ruang Publik. *Alsys*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.58578/alsys.v2i1.138>
- Bantaika, A., Son, A. L., Ndapa Deda, Y., & Garcia-Garcia, J. (2025). Mathematical concepts and cultural values in guest reception traditions: an ethnomathematic study of the Dawan Tribe Community on The Timor Island. *International Journal of Didactic Mathematics in Distance Education*, 2(1), 32–44. <https://doi.org/10.33830/ijdmde.v2i1.9702>
- Baylon, S. A. (2021). Studi Deskriptif Konflik dalam Komunitas Religius yang Berwajah Multikultural Ditinjau dari Aksiologi Max Scheler. *Forum*, 50(1), 100–112. <https://doi.org/10.35312/forum.v50i1.290>
- Benu, A. M. P., Anawoli, S. R., Natonis, H., & Baun, P. (2023). An Analysis of Naketi in Dawan Tribes. *Jurnal Edusaintek*, 1(November), 1–7.
- Benu, N. N., Prasetyo, L., & Denil, M. (2025). Ecological Metaphors in the Naton Oral Tradition of the Atoin Meto Culture in West Timor, Indonesia. *Linguistik Indonesia*, 43(1), 43–58. <https://doi.org/10.26499/li.v43i1.651>
- Boldoni, C. (2020). Uma Lulik as Heritage: Authorised Heritage Discourse in Timor-Leste*. *E-Cadernos CES*, 33. <https://doi.org/10.4000/eces.5298>
- Do Santos, A. D. A., Shantini, Y., & Lutfiansyach, D. Y. (2024). Peran (Uma Lulik) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Timor Leste. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 14479–14489.
- Ethelbert, Y. K., Pratama, M. R., & Dhosa, D. D. (2022). Tradisi Nono, Ume dan Uf Atoin Meto di Timor dan Relevansinya terhadap Budaya Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(2), 192–206. <https://doi.org/10.38043/jids.v6i2.3591>
- Falo, M., & Kolne, S. V. (2024). Menggali Model Ritual Usahatani Jagung Sebagai Simbol Identitas Petani di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Agrimor*, 9(1), 14–27. <https://doi.org/10.32938/ag.v9i1.2084>
- Guthrie, S. C. (1989). Trinity and Society. *Theology Today*, 46(2), 205–206. <https://doi.org/10.1177/004057368904600213>
- Haba, J. (2007). *Kearifan Lokal: Modal Sosial dalam Pembangunan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Handoyo, E. dkk. (2016). Etika Politik. In *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* (Vol. 03, Issue December 2016).
- Hargrove, B., & Neuhaus, R. J. (1985). The Naked Public Square: Religion and Democracy in America. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 24(3), 328. <https://doi.org/10.2307/1385824>
- Haryatmoko. (2015). *Etika Politik dan Kekuasaan Favorit*. Kompas Penerbit Buku.
- Hesselmans, M., & Teubner, J. (2017). A theology of liberation. In *A Theology of Liberation*. Orbis Books. <https://doi.org/10.4324/9781912282739>
- Irfan, M., & Wijaya, H. (2024). Integrasi Nilai Budaya Keluarga ke Dalam Pembelajaran Sekolah: Studi Kasus pada Siswa Multikultural di Kota Mataram. *Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya Dan Terapan*, 4(1), 19–34. <https://doi.org/10.58218/kasta.v4i1.1369>
- Ismaya, E. A., Purbasari, I., & Rahmawati, F. P. (2024). Teacher Strategies in Instilling Students Social Attitudes

- Through Learning Natural and Social Sciences in Class IV Elementary School. *Jurnal Pendidikan IPS*, 14(1), 81–86.
<https://doi.org/10.37630/jpi.v14i1.1573>
- James Smith. (2022). *The Public Theologian: Faith and Justice in a Pluralistic World*. Routledge.
- Meluk, O., Kollo, M., & Rohi, D. (2022). Okomama Menurut Tradisi Masyarakat Suku Dawan Di Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang. *Jurnal Artefak*, 9(1), 71.
<https://doi.org/10.25157/ja.v9i1.7254>
- Ndun, H. (2015). *Kosmologi Orang Dawan: Relasi, Ritual, dan Identitas*. Universitas Nusa Cendana Press.
- Ningsih, L., Pasaribu, M. A., Hasibuan, S. K., Amalia, Y., & Ginting, A. S. B. (2025). Peluang dan Tantangan Multikulturalisme di Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa. *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 804–812.
<https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.6012>
- Nugraha, D., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN*, 1(2).
- Paeth, S. R. (2017). Public Theology in the Context of Globalization. In *A Companion to Public Theology* (pp. 185–210). BRILL.
https://doi.org/10.1163/9789004336063_010
- Pakpahan, B. J. (2020). Editorial: Tema Teologi Publik di Tengah Krisis. *Theologia in Loco*, 2(1), 1–6.
<https://doi.org/10.55935/thilo.v2i1.188>
- Pasi, G. (2021). Membangun Teologi Publik Indonesia Dalam Kerangka Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. In *Teologi Publik: Sayap Metodologi & Praksis* (pp. 127–143). Kanisius.
- Ricoeur, P., & Blamey, K. (2024). Oneself as Another. In *Oneself as Another*. University of Chicago Press.
<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226844541.001.0001>
- Riyanto, A. (2020). *Metodologi Pematik & Anatomi Riset Filosofis Teologis*. Widya Sasana Publication.
- Riyanto, A. (2021a). Berteologi di Ruang Inklusif" "Sayap" Metodologi Felix Wilfred. In *Teologi Publik: Sayap Metodologi & Praksis* (pp. 39–62).
- Riyanto, A. (2021b). Makna Hidup Publik Yesus Kristus: Skema Bukit dan Kalvari. In F.X.E. Armada Riyanto (Ed.), *Teologi Publik: Sayap Metodologi & Praksis* (p. 3). Kanisius.
- Riyanto, A. (2021c). Pengantar. In *Teologi Publik; Sayap Metodologis dan Praksis* (F.X.E. Arm). Kanisius.
- Ross, D. C. (2012). Prophetic Dialogue, Reflections on Christian Mission Today. *Journal of Adult Theological Education*, 9(1), 106–107.
<https://doi.org/10.1179/ate.9.1.q366w100977778j8>
- Schliesser, C. (2023). Public Theology as Cultural Witness: Christological Contours for "Times That Are A'Changin'". *Religions*, 14(4), 485.
<https://doi.org/10.3390/rel14040485>
- Sili, A. M. (2025). The Deities ' Influence in the Dawan Tribe ' s Oe Kana Ritual : An Arnold van Gennep Analysis. *Futurity Philosophy*, 4–20.
- Smit, D. J. (2007). What Does 'Public Theology' Mean? *International Journal of Public Theology*, 1.
- Sudhiarsa, R. I. M. (2021). Memuliakan manusia dan menemukan Tuhan dalam diskursus teologi publik di Indonesia. In *Teologi Publik. Sayap Metodologi & Praksis* (pp. 105–126). Kanisius.
- Suminar, E. (2020). Simbol dan Makna Sirih Pinang pada Suku Atoni Pah Meto di Timor Tengah Utara. *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis*, 8(1), 55–62.
<https://doi.org/10.46806/jkb.v8i1.648>
- Taneo, R. F. S. (2025). Pancasila sebagai Agama Sipil? Analisis Kritis dalam

- Kerangka Teologi Publik Kristen di Indonesia. *Forum*, 54(1), 69–81. <https://doi.org/10.35312/forum.v54i1.727>
- Tracy, D. (1981). *The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism*. Crossroad.
- Tukan, A. I. N., & Janu, F. (2021). Menelaah Peran Teologi di Ruang Publik Indonesia Dalam Terang Diskusi Habermas dan Ratzinger. In F. X. E. A. Riyanto (Ed.), *Teologi Publik: Sayap Metodologi & Praksis* (pp. 63–76). Kanisius.
- Un Bria, F. M., Masan, V. K., Abatan, Y., & Bustan, F. (2025). Mengungkap Tema Ritual Puah Manus Masyarakat As Manlea dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Bangsa. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 7(1), 421–431. <https://doi.org/10.37364/jireh.v7i1.336>
- Yosia, A. (2023). Teologi Publik dan Pendidikan Agama Kristen K-12 di Indonesia: Suatu Eksplorasi Awal. *Edulead: Journal of Christian Education and Leadership*, 4(1), 98–110. <https://doi.org/10.47530/edulead.v4i1.140>
- Yulianto, B. (2024). Development of Teaching Materials for Multicultural Education Literacy in Integrating Baduy Tribal Culture in International Elementary Schools. *Jurnal Sustainable*, 7, 166–180. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v7i1.4066>